



Optimalisasi TPS3R Desa Wilulang Melalui Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sabilulungan

Moh. Arif Hidayat¹, Sri Arini Chudhriati², Moh. Wahyuddin³, Ahmad Fariq Asybal Aufa⁴, Arief Rahman⁵

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: hidayat7move@gmail.com¹, arinichudhriati@gmail.com², mohmuhammad406@gmail.com³,
asybalfariq@gmail.com⁴, arief.rachman@uinssc.ac.id⁵

Kata Kunci:	ABSTRAK
TPS3R; pemberdayaan masyarakat; komunikasi pembangunan; kelompok swadaya masyarakat; pengelolaan sampah.	Penelitian ini mengkaji fenomena stagnasi operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, pascapembangunan infrastruktur senilai Rp 600.000.000,- pada tahun 2023. Magnitudo persoalan tampak dari menyusutnya jumlah petugas aktif dari lima menjadi satu orang serta terhentinya fungsi pemilahan dan pengomposan, sehingga infrastruktur senilai Rp 600.000.000,- tidak beroperasi secara optimal. Penelitian bertujuan mendeskripsikan kondisi eksisting, menganalisis faktor penyebab kesenjangan implementasi, serta merumuskan strategi komunikasi dan model pemberdayaan yang tepat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kuwu, pengurus KSM, dan petugas lapangan. Data dianalisis menggunakan kerangka SWOT dan 5M, diinterpretasikan melalui teori implementasi kebijakan Grindle, pendekatan proses belajar kelembagaan Korten, serta teori perencanaan dan strategi komunikasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan utama terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan dan absennya strategi komunikasi partisipatif dalam sosialisasi pemilahan sampah di sumber, khususnya ketiadaan komunikator tetap dan saluran komunikasi terjadwal bagi 320 rumah tangga dan 4 institusi pendidikan sasaran. Penelitian merekomendasikan strategi intervensi bertahap meliputi advokasi legalitas kepengurusan, standarisasi metode operasional disertai strategi komunikasi berbasis partisipasi masyarakat, dan penguatan tata kelola keuangan berbasis iuran warga.
Keywords:	ABSTRACT
TPS3R; community empowerment; development communication; community self-help group; waste management.	<i>This study examines the phenomenon of operational stagnation of the Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facility (TPS3R) in Wilulang Village, Susukan Lebak District, after the construction of infrastructure worth Rp 600,000,000,- in 2023. The magnitude of the problem is evident from the reduction in the number of active officers from five to one person and the cessation of sorting and composting functions, so that the infrastructure worth Rp 600,000,000,- does not operate optimally. The study aims to describe the existing conditions, analyze the factors causing implementation gaps, and formulate appropriate communication strategies and empowerment models. Using a descriptive qualitative approach with a case study design, data were collected through observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGDs) with Kuwu, KSM administrators, and field officers. Data were analyzed using the SWOT and 5M frameworks, interpreted through Grindle's policy implementation theory, Korten's institutional learning process approach, and development planning and communication strategy theory. The results of the study indicate that the main gap lies in weak institutional capacity and the absence of participatory communication strategies in the socialization of waste sorting at the source, particularly the absence of permanent communicators and scheduled communication channels for 320 households and 4 target educational institutions. The study recommends a phased intervention strategy including advocacy for the legality of management, standardization</i>

PENDAHULUAN

Persoalan sampah telah menjadi salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan berskala global. Bank Dunia memperkirakan timbunan sampah padat perkotaan dunia mencapai 2,01 miliar ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050, sementara sekurang-kurangnya sepertiga di antaranya belum dikelola secara ramah lingkungan (Kaza dkk., 2018). Beban tersebut dirasakan paling berat oleh negara-negara berkembang di kawasan Global South yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah (Abubakar et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dipandang sebagai salah satu strategi paling relevan untuk menekan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus menumbuhkan tanggung jawab warga sejak dari sumber sampah.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang banyak diadopsi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah dari sumbernya (Ari et al., 2026; Ratri et al., 2022). Meskipun demikian, keberadaan infrastruktur fisik semata tidak menjamin keberlanjutan operasional TPS3R apabila tidak diikuti oleh kesiapan kelembagaan pengelola dan partisipasi aktif masyarakat (Damiti et al., 2024; Darmadi & Raharjo, 2023).

Fenomena ini tampak jelas pada kasus TPS3R Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Fasilitas TPS3R dibangun pada tahun 2023 melalui kegiatan swakelola dengan sumber dana Bantuan Provinsi Jawa Barat, senilai kontrak Rp 600.000.000,- (nomor kontrak 605/151-PKS/SP/2023), dilengkapi mesin conveyor dan motor roda tiga. Pengelolaan operasionalnya diamanahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "Sabilulungan" yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kuwu Wilulang Nomor 140/Kep. 09-Sekret/2021 dengan masa bakti kepengurusan 2021–2023.

Pada masa awal operasional, TPS3R sempat mempekerjakan lima orang petugas dengan pembagian kerja yang jelas antara pengangkutan dan pemilahan sampah, dibiayai dari Dana Desa sebesar Rp 1.000.000,-/orang/bulan. Namun, sejak masa bakti kepengurusan KSM berakhir pada tahun 2023 tanpa perpanjangan formal, operasional TPS3R mengalami kemunduran signifikan. Saat ini hanya tersisa satu petugas aktif dengan ritme kerja seminggu sekali, fungsi pemilahan dan pengomposan berhenti total, dan TPS3R beralih fungsi sekadar menjadi tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke TPA Karangwareng. Pembiayaan operasional pun bergeser dari Dana Desa menjadi retribusi warga (Rp 30.000,- s.d. Rp 50.000,-/rumah) yang berpotensi mencapai Rp 12.960.000,- dari 320 rumah dan 4 gedung sekolah, namun belum dikelola dalam pembukuan yang akuntabel.

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan (gap) klasik dalam kebijakan publik antara keberhasilan pengadaan infrastruktur (hilir) dan kegagalan kesiapan kapasitas sosial-kelembagaan masyarakat (hulu) sebuah pola yang juga ditemukan pada studi TPS3R di berbagai daerah lain, seperti lemahnya kepatuhan pemilahan sampah di sumber dan variasi kapasitas SDM pengelola (Ari et al., 2026), maupun persoalan keberlanjutan pembiayaan dan dukungan pemerintah daerah (Damiti et al., 2024; Mukti, 2024). Kekhasan kasus Wilulang

terletak pada dua persoalan yang saling berkelindan: pertama, kevakuman kelembagaan yang diperparah oleh rangkap jabatan pengurus KSM dengan aparat desa; kedua, absennya sosialisasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga yang menyebabkan sampah yang masuk ke TPS3R tetap tercampur.

Persoalan kedua inilah yang menempatkan isu ini relevan untuk dikaji dari perspektif ilmu komunikasi, khususnya komunikasi pembangunan. Sebagaimana ditegaskan Wijaya, (2015), keberhasilan program pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan dan strategi komunikasi yang tepat mencakup penetapan komunikator, analisis kebutuhan khalayak, penyusunan pesan, hingga pemilihan saluran komunikasi. Kegagalan program pembangunan, sebagaimana diakui oleh para pengambil kebijakan, kerap kali bersumber dari hilangnya komunikasi efektif antara pengambil keputusan, pendamping program, dan kelompok sasaran (Wijaya, 2015). Hal serupa ditegaskan dalam kajian pendekatan komunikasi dan pembangunan yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai penentu tujuan pembangunan mereka sendiri, bukan sekadar objek program dari atas.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji efektivitas TPS3R di berbagai daerah dengan temuan yang beragam. Ratri et al., (2022) di Kota Batu dan Mukti, (2024) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa keberadaan sarana TPS3R kerap tidak diiringi kesiapan pengelola, sehingga reduksi sampah tidak berjalan optimal. Darmadi & Raharjo, (2023) di Dayeuhkolot serta Priyono & Pramesetyawati, (2024) pada TPS3R Peganden dan Betoyoguci menegaskan pentingnya integrasi aspek teknis dan kelembagaan dalam optimalisasi pengelolaan. Desrimon et al., (2022) di Desa Batu Belah dan Kamal et al., (2024) di Kelurahan Panjunan menyoroti perlunya perbaikan pelayanan serta penilaian kesediaan warga membayar (willingness to pay) sebagai basis keberlanjutan.

Dari sisi tata kelola dan kemandirian ekonomi, Zulfikar et al., (2024) menemukan bahwa potensi ekonomi sirkular dan efisiensi operasional TPS3R hanya dapat direalisasikan apabila didukung manajemen yang tertib, sementara Amanda et al., (2024) menekankan pentingnya collaborative governance antaraktor. Model pengembangan berbasis pembelajaran sosial dan kemitraan (Firmansyah et al., 2024), praktik bank sampah sebagai instrumen ekonomi lokal (Purba et al., 2014; Wulandari et al., 2017), pemberdayaan masyarakat desa (Utomo et al., 2024), serta pengelolaan TPS3R Mojo Makmur, Baharintasari et al., (2026) secara konsisten menegaskan bahwa keberlanjutan TPS3R merupakan persoalan sosial-kelembagaan, bukan semata persoalan teknis.

Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut menyoroti dimensi teknis-operasional dan pembiayaan, sedangkan dimensi komunikasi pembangunan khususnya proses sosialisasi pemilahan sampah di sumber dan persoalan kelembagaan pengelola masih jarang dianalisis secara eksplisit. Kesenjangan inilah yang menjadi celah (gap) yang hendak diisi penelitian ini. Urgensi penelitian terletak pada mendesaknya penyelamatan aset publik yang tidak produktif: infrastruktur TPS3R senilai Rp 600.000.000,- di Desa Wilulang praktis berhenti beroperasi hanya dalam kurun dua tahun sejak dibangun, sementara timbulan sampah dari 320 rumah tangga dan 4 institusi pendidikan terus berlangsung setiap hari. Tanpa intervensi kelembagaan dan komunikasi yang tepat waktu, stagnasi ini berpotensi menjadi permanen dan menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus risiko lingkungan bagi masyarakat desa.

Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang umumnya menempatkan persoalan TPS3R sebagai isu teknis, pembiayaan, atau tata kelola semata, penelitian ini untuk pertama kalinya

menganalisis stagnasi TPS3R secara eksplisit dan simultan melalui kerangka teori implementasi kebijakan Grindle (1980), pendekatan proses belajar kelembagaan Korten (1980), serta model komunikasi Lasswell dan strategi komunikasi pembangunan (Wijaya, 2015). Kebaruan lain terletak pada identifikasi persoalan rangkap jabatan pengurus KSM dengan aparat desa sebagai faktor spesifik yang belum banyak dibahas dalam literatur TPS3R sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa Mata Kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik untuk memetakan akar masalah stagnasi TPS3R Desa Wilulang serta merumuskan strategi pemberdayaan KSM Sabilulungan yang mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik dan komunikasi pembangunan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam dinamika sosial-kelembagaan KSM Sabilulungan dalam konteks alamiahnya, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara terukur. Sebagaimana ditegaskan Korten (1980), pemahaman terhadap kesesuaian (fit) antara kebutuhan masyarakat, program, dan kapasitas organisasi pelaksana hanya dapat diperoleh melalui pendekatan yang memungkinkan penggalan data secara kontekstual dan partisipatif karakteristik yang menjadi kekuatan utama metode kualitatif.

Sejalan dengan kerangka teori komunikasi pembangunan yang digunakan (lihat Bab I), penelitian ini juga mengadopsi prinsip strategi partisipasi (Wijaya, 2015), di mana peneliti tidak memposisikan diri sebagai pihak eksternal yang berjarak, melainkan turut terlibat dalam proses observasi dan diskusi bersama subjek penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Wilulang, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, dengan fokus pada objek TPS3R yang dikelola oleh KSM Sabilulungan. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam dua tahap utama:

Tabel 1. Kegiatan Penelitian

Tahap	Kegiatan	Waktu	Lokasi
Identifikasi Masalah	Observasi awal, wawancara, dan kunjungan lokasi	Rabu, 6 Mei 2026	TPS3R & lingkungan Desa Wilulang
Pengumpulan Data Inti	Focus Group Discussion (FGD)	Kamis, 11 Juni 2026	Aula Kantor Kuwu Wilulang

Sumber: Data diolah

Subjek dan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan posisi dan pengetahuan informan terhadap objek penelitian. Mengacu

pada teori strategi komunikasi Rogers Wijaya, (2015) yang menekankan pentingnya memahami kelompok-kelompok dalam masyarakat sasaran, informan penelitian dipetakan sebagai berikut:

1. Kuwu (Kepala Desa) Wilulang sebagai pemangku kebijakan tertinggi di tingkat desa dan pengambil keputusan terkait legalitas kepengurusan KSM.
2. Ketua dan Sekretaris KSM Sabilulungan sebagai pengelola langsung TPS3R, termasuk informasi terkait rangkap jabatan Sekretaris KSM dengan Sekretaris Desa.
3. Petugas operasional TPS3R (Pak Kusnan) sebagai pelaksana lapangan yang memberikan gambaran kondisi riil operasional harian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Lapangan

Dilakukan pada tahap identifikasi masalah untuk mengamati kondisi fisik TPS3R, meliputi kondisi mesin conveyor, motor roda tiga, area pemilahan, dan area penampungan residu.

Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Kuwu Wilulang dan perangkat desa yang membidangi pengelolaan sampah untuk menggali informasi mengenai riwayat pembangunan TPS3R, struktur kepengurusan KSM, serta kendala operasional yang dihadapi.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilaksanakan sebagai teknik pengumpulan data utama untuk menjaring pandangan kolektif dari Kuwu dan unsur KSM secara langsung terkait akar masalah dan arah penyelesaian. Pemilihan FGD sebagai metode utama sejalan dengan prinsip strategi partisipasi dalam komunikasi pembangunan (Wijaya, 2015), yang menekankan proses berbagi pengetahuan secara setara antara peneliti dan subjek penelitian, bukan sekadar penggalian data satu arah.

Teknik Analisis Data

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), yang dilengkapi tiga instrumen bantu: (1) pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pokok-pokok pertanyaan mengenai riwayat pembangunan, struktur kepengurusan, serta kendala operasional TPS3R; (2) lembar observasi untuk mencatat kondisi fisik sarana, meliputi mesin conveyor, motor roda tiga, area pemilahan, dan area penampungan residu; serta (3) panduan *Focus Group Discussion* (FGD) yang memuat daftar isu untuk menjaring pandangan kolektif Kuwu dan unsur KSM. Dokumentasi berupa foto lapangan dan salinan dokumen legalitas (SK Kuwu dan kontrak pembangunan) digunakan sebagai data pendukung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua instrumen analisis yang saling melengkapi:

a. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Digunakan untuk memetakan posisi KSM Sabilulungan secara komprehensif mencakup kekuatan (infrastruktur dan legalitas), kelemahan (keterampilan teknis dan SOP), peluang

(potensi pasar dan regulasi), serta ancaman (budaya masyarakat dan fluktuasi harga daur ulang) sebagai dasar perumusan strategi pendampingan yang tepat sasaran.

b. Analisis 5M (*Man, Money, Method, Machine, Material*)

Digunakan untuk mengidentifikasi masalah operasional secara lebih terperinci pada tiap unsur manajemen, dengan aspek *Man* (manusia) diposisikan sebagai pusat dari keempat unsur lainnya mengingat akar masalah utama pada kasus ini bersifat sosial-kelembagaan, bukan sekadar keterbatasan sarana.

Kedua instrumen analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Grindle (1980) Adi et al., (2024) untuk menjelaskan kesenjangan antara isi kebijakan dan konteks implementasi, dilengkapi dengan analisis proses belajar kelembagaan Korten (1980) Akib, (2010) serta teori strategi komunikasi pembangunan Wijaya, (2015) untuk merumuskan strategi intervensi yang berorientasi pada partisipasi masyarakat.

Secara prosedural, analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles et al., (2014) yang mencakup tiga alur kegiatan yang berlangsung simultan: reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data hasil observasi, wawancara, dan FGD sesuai tema kelembagaan, operasional, pembiayaan, dan komunikasi; penyajian data, yaitu menyusun temuan ke dalam matriks SWOT, kerangka 5M, dan unsur-unsur komunikasi Lasswell; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan pola dan strategi intervensi yang diverifikasi kembali melalui triangulasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari Kuwu, pengurus KSM, dan petugas operasional lapangan untuk memastikan konsistensi data mengenai kondisi eksisting TPS3R, khususnya terkait riwayat pembiayaan, jumlah tenaga kerja, dan kronologi kevakuman kelembagaan sejak tahun 2023.

Selain triangulasi sumber, keabsahan data juga diperkuat melalui triangulasi metode, yaitu membandingkan konsistensi temuan yang diperoleh dari tiga teknik pengumpulan data yang berbeda observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan FGD sehingga simpulan tidak bertumpu pada satu teknik tunggal.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Kegiatan lapangan didahului dengan permohonan izin resmi kepada Pemerintah Desa Wilulang, dan seluruh informan memberikan persetujuan berdasarkan penjelasan (informed consent) sebelum wawancara maupun FGD dilaksanakan. Data dan pernyataan informan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik, dan keikutsertaan informan bersifat sukarela.

Peran Peneliti dan Fasilitator

Perlu ditegaskan perbedaan dua peran yang melekat pada tim dalam FGD. Sebagai peneliti, tim menjalankan fungsi pengumpulan dan analisis data secara sistematis serta menjaga jarak analitis terhadap objek kajian; sedangkan sebagai fasilitator pemberdayaan, tim berperan mendorong dialog setara dan memandu perumusan solusi bersama tanpa mendikte keputusan.

Pemisahan peran ini penting agar proses partisipatif tidak mereduksi objektivitas data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Kondisi Eksisting TPS3R Desa Wilulang

TPS3R Desa Wilulang dibangun pada tahun 2023 melalui skema swakelola dengan sumber dana Bantuan Provinsi Jawa Barat, senilai kontrak Rp 600.000.000,- (Nomor 605/151-PKS/SP/2023, tertanggal 10 April 2023). Fasilitas ini dirancang untuk melayani kurang lebih 320 rumah tangga yang tersebar di dua Rukun Warga, dilengkapi infrastruktur mesin conveyor dan motor roda tiga sebagai sarana pengangkutan. Uraian profil dan kondisi eksisting pada subbagian ini memperdalam gambaran ringkas yang telah dikemukakan pada Pendahuluan dengan data primer hasil observasi dan wawancara lapangan, sehingga berfungsi sebagai basis empiris bagi analisis pada subbagian-subbagian berikutnya, bukan sebagai pengulangan.

Pada masa awal operasional, TPS3R menjalankan fungsi sesuai desain awal: lima orang petugas dari unsur masyarakat (Kusnan, Slamet, Cahya, Suhardi, dan Parto) dipekerjakan dengan pembagian tugas yang jelas dua orang bertugas mengangkut sampah dari sumber ke hanggar dengan jadwal per tiga hari, sementara tiga orang lainnya bertugas memilah sampah di hanggar. Skema pembiayaan saat itu sepenuhnya bertumpu pada Dana Desa, dengan upah Rp 1.000.000,-/orang/bulan serta anggaran ritasi residu ke TPA sebesar Rp 1.000.000,-/bulan.

Kondisi ini berubah signifikan setelah masa bakti kepengurusan KSM Sabilungan berakhir pada tahun 2023 tanpa perpanjangan formal. Saat ini, operasional TPS3R Desa Wilulang menyisakan gambaran berikut:

Tabel 2. Kondisi Eksisting TPS3R Desa Wilulang

Aspek	Kondisi Awal (2023)	Kondisi Saat Ini (2026)
Jumlah petugas aktif	5 orang	1 orang (Pak Kusnan)
Frekuensi pengangkutan	Per 3 hari	1 minggu sekali
Fungsi pemilahan	Berjalan (3 petugas)	Berhenti total
Fungsi pengomposan	Berjalan sebagian	Berhenti total
Sumber pembiayaan	Dana Desa (Rp 1.000.000,-/org/bln)	Retribusi warga (Rp 30.000–50.000,-/rumah)
Fungsi TPS3R	Pengolahan sampah terpilah	Sekadar penampungan sementara
Pelaporan manajerial	—	Tidak ada laporan berkala ke KSM

Sumber: Data diolah

Kondisi ini menunjukkan pola yang konsisten dengan temuan Ari et al., (2026) di Kabupaten Badung, di mana sejumlah TPS3R mengalami kerusakan sarana dan variasi signifikan dalam kapasitas SDM pengelola akibat lemahnya pembinaan berkelanjutan. Kesamaan pola ini menegaskan bahwa persoalan stagnasi TPS3R bukan kasus tunggal, melainkan gejala struktural yang juga ditemukan Mukti, (2024) dalam evaluasi implementasi kebijakan TPS3R di Kabupaten Purbalingga.

Identifikasi Masalah

Vakumnya Kelembagaan dan Masalah Dual-Discourse Jabatan

Secara legalitas, KSM Sabilulungan dibentuk berdasarkan SK Kuwu Nomor 140/Kep. 09-Sekret/2021 dengan masa bakti tiga tahun (2021–2023). Sejak berakhirnya masa bakti tersebut hingga saat penelitian dilakukan, belum ada perpanjangan formal. Persoalan ini diperparah oleh rangkap jabatan Sekretaris KSM yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa, sehingga menciptakan beban kerja ganda yang menurunkan fokus tata kelola KSM.

Dalam FGD yang dilaksanakan pada 11 Juni 2026, Kuwu Wilulang menyatakan adanya krisis figur kepemimpinan di desa, sehingga diambil keputusan taktis untuk mengaktifkan kembali pengurus lama melalui penerbitan SK Kuwu yang baru tanpa melalui proses regenerasi kepengurusan yang partisipatif.

Jika ditinjau menggunakan konsep learning-process approach Korten (1980), keputusan ini mencerminkan jalan pintas (*blueprint approach*) yang melanggengkan ketergantungan top-down, alih-alih membangun proses belajar organisasi yang adaptif. Kondisi serupa turut ditemukan Damiti et al., (2024) dalam kajiannya atas TPS3R di Provinsi Gorontalo, yang menekankan bahwa keberlanjutan kelembagaan pengelola sampah sangat bergantung pada konsistensi dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah, bukan semata pada keberadaan struktur organisasi di atas kertas.

Kemunduran Metode Operasional (Degradasi SOP)

Menyusutnya jumlah petugas dari lima menjadi satu orang, disertai berhentinya fungsi pemilahan dan pengomposan, menunjukkan degradasi metode operasional yang drastis. TPS3R yang semula dirancang sebagai fasilitas pengolahan sampah terpilah kini beralih fungsi sekadar menjadi titik penampungan sementara sebelum diangkut ke TPA Karangwareng oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tidak adanya SOP tertulis mengenai alur kerja mulai dari jadwal pengangkutan, teknik pemilahan, hingga mekanisme pelaporan menjadi akar dari ketidakjelasan tanggung jawab kerja. Winanda et al., (2020) menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kejelasan mekanisme kerja yang disepakati bersama, bukan hanya oleh ketersediaan tenaga kerja. Tanpa SOP yang baku, motivasi kerja petugas tunggal yang tersisa pun rentan menurun karena tidak adanya sistem evaluasi maupun pelaporan yang terstruktur ke pengurus KSM.

Transisi Finansial yang Tidak Terkelola

Pergeseran sumber pembiayaan dari Dana Desa menjadi retribusi warga mencerminkan transisi menuju kemandirian finansial yang secara konsep sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pemberdayaan. Namun demikian, potensi dana terkumpul sebesar Rp 12.960.000,- dari 320 rumah dan 4 gedung sekolah/madrasah belum dikelola dalam pembukuan KSM yang akuntabel dan transparan.

Ditinjau dari perspektif *Content of Policy* dalam teori Grindle (1980), transisi pembiayaan ini menggambarkan situasi di mana kebijakan (peralihan ke sistem swadaya) telah dirumuskan secara implisit oleh keadaan, namun konteks implementasinya berupa kapasitas administrasi keuangan KSM belum siap menopang perubahan tersebut. Kondisi ini konsisten dengan

temuan Ari et al., (2026) yang merekomendasikan mekanisme insentif dan tata kelola keuangan yang jelas sebagai prasyarat keberlanjutan TPS3R berbasis retribusi warga.

Analisis SWOT KSM Sabilulungan

Tabel 3. Analisis SWOT KSM Sabilulungan

Komponen	Deskripsi Identifikasi
<i>Strengths</i>	Infrastruktur fisik tersedia sejak 2023; legalitas struktur organisasi KSM sudah ada; dukungan akademis dari kegiatan pengabdian mahasiswa
<i>Weaknesses</i>	Kurangnya keterampilan teknis operasional alat; rendahnya motivasi pengurus karena belum ada revenue stream yang jelas; belum adanya SOP kerja
<i>Opportunities</i>	Potensi pasar pupuk organik untuk pertanian desa; regulasi daerah yang mewajibkan pengelolaan sampah; kesediaan warga membayar iuran jika layanan terbukti baik
<i>Threats</i>	Budaya membuang/membakar sampah sembarangan; fluktuasi harga jual material daur ulang; kurangnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah desa

Sumber: Data diolah

Berdasarkan identifikasi SWOT di atas, dirumuskan empat kuadran strategi sebagai output analisis:

Strategi SO (*Strengths–Opportunities*)

Memanfaatkan infrastruktur dan legalitas kelembagaan yang telah tersedia untuk menggarap potensi pasar pupuk organik dan kesediaan warga membayar iuran, sehingga TPS3R memiliki sumber pendapatan mandiri.

Strategi ST (*Strengths–Threats*)

Mendayagunakan dukungan akademis dan legalitas kelembagaan untuk mendorong penerbitan Peraturan Desa yang mengatur kewajiban pilah sampah, guna menekan budaya membuang dan membakar sampah sembarangan.

Strategi WO (*Weaknesses–Opportunities*)

Mengatasi lemahnya keterampilan teknis dan ketiadaan SOP melalui pelatihan operasional dan pendampingan, agar peluang pasar dan regulasi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Strategi WT (*Weaknesses–Threats*)

Membangun sistem insentif dan revenue stream berbasis iuran untuk meningkatkan motivasi pengurus sekaligus meredam risiko fluktuasi harga daur ulang dan lemahnya komitmen berkelanjutan pemerintah desa.

Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan utama KSM Sabilulungan bukan pada keterbatasan sarana (*Strengths* justru cukup kuat), melainkan pada lemahnya kapasitas pengelolaan dan insentif kerja (*Weaknesses*) sebuah pola yang juga digarisbawahi Mukti, (2024) sebagai penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan TPS3R di berbagai daerah.

Analisis 5M

Dalam kerangka pemberdayaan, unsur *Man* (manusia) diposisikan sebagai pusat dari keempat unsur lainnya, karena seluruh persoalan teknis pada dasarnya bermuara pada kesiapan manusia yang mengelolanya.

1. **Man:** Rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan mesin dan memilah sampah secara sistematis; belum tumbuhnya sense of ownership karena proyek dipersepsikan sebagai program top-down dari pemerintah.
2. **Money:** Belum tersedianya modal kerja untuk listrik, BBM mesin, dan insentif petugas; belum terbentuknya kesepakatan sistem iuran warga yang menjamin keberlanjutan finansial.
3. **Method:** Belum adanya SOP dari pengangkutan rumah tangga hingga pemilahan di TPS3R; minimnya sosialisasi pemilahan sampah di sumber, sehingga sampah yang masuk masih tercampur.
4. **Machine:** Risiko kerusakan/korosi mesin conveyor dan motor roda tiga akibat tidak terpakai sejak 2023; belum ada pelatihan teknis pemeliharaan alat.
5. **Material:** Volume sampah harian belum terdata secara pasti; sampah organik yang tidak terolah berpotensi menimbulkan bau dan komplain warga.

Klaim-klaim pada kelima unsur di atas berpijak pada data observasi lapangan (6 Mei 2026) dan pandangan yang mengemuka dalam FGD bersama Kuwu dan pengurus KSM (11 Juni 2026), antara lain teramatnya mesin conveyor yang tidak beroperasi sejak 2023, menyusutnya jumlah petugas aktif menjadi satu orang, serta belum tersedianya pembukuan iuran warga yang tertib.

Analisis Komunikasi dan Advokasi Kebijakan

Persoalan pada unsur Method khususnya minimnya sosialisasi pemilahan sampah di sumber merupakan inti persoalan yang paling relevan dikaji dari perspektif ilmu komunikasi. Menggunakan model Lasswell (Wijaya, 2015), persoalan ini dapat diurai sebagai berikut:

1. **Komunikator:** Belum ada pihak yang secara konsisten berperan sebagai komunikator program (baik KSM maupun pemerintah desa), akibat kevakuman kepengurusan sejak 2023.
2. **Pesan:** Belum tersusun pesan persuasif yang mudah dipahami warga terkait manfaat pemilahan sampah; konsep dasar seperti pemilahan organik-anorganik belum tersosialisasikan secara sistematis.
3. **Saluran:** Belum ada saluran komunikasi terjadwal antara KSM dan warga (mis. pertemuan RT/RW, media sosial desa, atau pengumuman berkala).
4. **Komunikan:** 320 rumah tangga dan 4 institusi pendidikan sebagai khalayak sasaran belum dipetakan kebutuhan dan hambatan psikologisnya secara sistematis apakah karena ketidaktahuan teknis, atau resistensi kebiasaan lama.
5. **Efek:** Akibatnya, sampah yang masuk ke TPS3R tetap tercampur, sehingga menyulitkan kerja KSM sekalipun terdapat kemauan untuk mengolah.

Merujuk pada strategi komunikasi pembangunan yang diidentifikasi Harun dan Ardianto (Wijaya, 2015), pendekatan yang paling sesuai untuk konteks Wilulang adalah strategi partisipasi, yang menekankan keterlibatan warga sebagai subjek yang setara dalam proses berbagi pengetahuan sejalan dengan filosofi Sabilulungan (gotong royong) yang menjadi nama

KSM itu sendiri. Pendekatan ini juga selaras dengan Pendekatan IV dalam kajian komunikasi-pembangunan, yang menekankan pembangunan dari tingkat masyarakat paling bawah dan penggunaan teknologi tepat guna, alih-alih pendekatan instruksional satu arah. Selain itu, keberhasilan pendampingan tim mahasiswa terhadap KSM turut ditentukan oleh kualitas relasi yang dibangun.

Perbandingan dengan Studi Kasus Lain

Dibandingkan dengan studi-studi TPS3R terdahulu, kasus Wilulang menunjukkan kemiripan sekaligus kekhasan. Kemiripan tampak pada pola umum stagnasi pasca-pembangunan infrastruktur, sebagaimana ditemukan Ratri et al., (2022) di Kota Batu dan Mukti, (2024) di Purbalingga, yang sama-sama menyoroti kesenjangan antara pengadaan sarana dan kesiapan pengelola. Darmadi & Raharjo, (2023) di Dayeuhkolot juga menekankan pentingnya strategi pengelolaan yang terintegrasi antara aspek teknis dan kelembagaan, sejalan dengan temuan pada bab ini.

Kekhasan kasus Wilulang terletak pada dua hal: pertama, adanya persoalan rangkap jabatan pengurus KSM dengan aparat desa yang secara spesifik belum banyak dibahas dalam literatur TPS3R sebelumnya; kedua, penggunaan perspektif komunikasi pembangunan sebagai pisau analisis tambahan terhadap persoalan sosialisasi pemilahan sampah di sumber — sebuah dimensi yang pada studi terdahulu umumnya dibahas secara implisit sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, namun belum dianalisis secara eksplisit melalui unsur-unsur komunikasi (komunikator, pesan, saluran, komunikan, efek).

Strategi Pemberdayaan yang Diusulkan

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, tim pengabdian merumuskan strategi intervensi bertahap sebagai berikut:

Tahap 1 Advokasi Legalitas

Mengawal penerbitan SK Kuwu terbaru untuk pengurus KSM Sabilulungan agar memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam mengelola keuangan desa, sekaligus mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes) tentang kewajiban pilah sampah dan legalitas penarikan iuran.

Indikator keberhasilan: terbitnya SK Kuwu terbaru dan rancangan Peraturan Desa tentang pilah sampah serta legalitas iuran dalam kurun tiga bulan.

Tahap 2 Standardisasi Metode dan Strategi Komunikasi

Menyusun SOP pelayanan pengangkutan sampah terpilah (organik vs. anorganik), melatih kembali petugas agar fungsi conveyor dan komposting aktif kembali, serta merancang strategi komunikasi partisipatif berbasis bahasa lokal (mis. "sampah jadi berkah") untuk mensosialisasikan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Indikator keberhasilan: tersedianya dokumen SOP pengangkutan dan pemilahan, aktifnya kembali fungsi conveyor dan komposting, serta terlaksananya minimal satu siklus sosialisasi di seluruh RT sasaran.

Tahap 3 Kemandirian Finansial

Membantu KSM mengelola potensi iuran warga (Rp 12.960.000,-/bulan) secara proporsional untuk insentif petugas, biaya operasional motor roda tiga, biaya ritasi ke TPA Karangwareng, dan kas perawatan mesin, disertai sistem pembukuan yang transparan.

Indikator keberhasilan: tersusunnya pembukuan iuran yang transparan, tercapainya tingkat pembayaran iuran minimal 70% rumah tangga, dan terpenuhinya biaya operasional bulanan dari iuran warga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa TPS3R Desa Wilulang mengalami kemunduran operasional signifikan sejak 2023, ditandai penurunan jumlah petugas, terhentinya pemilahan dan pengomposan, serta beralihnya fungsi fasilitas menjadi tempat penampungan sementara. Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan pengelola, yang bersumber dari kevakuman kepengurusan KSM, ketiadaan SOP operasional, serta tidak adanya komunikator tetap dan saluran komunikasi terjadwal sehingga sosialisasi pemilahan sampah di sumber tidak tersampaikan secara efektif. Sebagai tindak lanjut, strategi komunikasi pembangunan partisipatif dirumuskan dengan menempatkan tim pendamping sebagai fasilitator, difokuskan pada penguatan legalitas kepengurusan, standardisasi operasional dan komunikasi, serta perbaikan tata kelola keuangan berbasis iuran warga sebagai dasar keberlanjutan. Keterbatasan pada cakupan satu desa membuka peluang penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas model pada konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I., Maniruzzaman, K., & Dano, U. (2022). Environmental Sustainability Impacts Of Solid Waste Management Practices In The Global South. *Mdpi.Comir Abubakar, Km Maniruzzaman, Ul Dano, Fs Alshihri, Ms Alshammari, Sms Ahmedinternational Journal Of Environmental Research And Public Health*, 2022•Mdpi.Com.
- Adi, D. A., Rozikin, M. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rpjmd Berdasarkan Perspektif Grindle (Studi Di Kabupaten Lamongan). *Jiap.Ub.Ac.Id*, 10(2), 181–190. <https://Jiap.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jiap/Article/View/1614>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Academia.Edu*.
- Amanda, D., Muhammad, H. (2024). Collaborative Governance In Waste Management At The Tps3r Makmur Jaya Ksm, Eka Jaya Subdistrict, Paal Merah District. *Jgpa.Unja.Ac.Idd Amanda, Ha Muhammad, Sd Elsijournal Of Governance And Public Affairs*, 2024•Jgpa.Unja.Ac.Id, 1(2). <https://Jgpa.Unja.Ac.Id/Jgpa/Article/View/12>
- Ari, A. A. M., Made, A. S. I., Nyoman, M. I., Ngurah, L. R. I. G. A., & Agung. (2026). Penguatan Tps 3r Sebagai Solusi Penanganan Sampah Berkelanjutan Di Kabupaten Badung. *Suara Analis Kebijakan*, 4(3). <https://Sajak.Lan.Go.Id/Article/View/165>
- Damiti, R. A., Lihawa, F., Wahyuni Baderan, D. K., Studi Kependudukan, P., & Hidup, L. (2024). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Tps3r Di Provinsi Gorontalo. *Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Idra Damiti, F Lihawa, Dwk Baderanjurnal Of Creative Student Research*, 2024•Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Id, 2(6), 225–237. <https://Doi.Org/10.55606/Jcsr-Politama.V2i6.2654>
- Darmadi, D., & Raharjo, S. Y. (2023). Strategi Pengelolaan Persampahan Dengan Program

- Tps 3r Di Kabupaten Bandung (Dayeuhkolot). *Prosiding Ftsp Series*, 1540–1548. <https://Eproceeding.Itenas.Ac.Id/Index.Php/Ftsp/Article/View/2639>
- Desrimon, A., Islah, M. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Tps 3r Di Desa Batu Belah. *Jes-Tm.Orga Desrimon, M Islah, Bd Putrijournal Of Social And Community Service*, 2022•*Jes-Tm.Org*, 1(4), 2986–3031. <https://Doi.Org/10.31004/Jestmc.V1i3>
- Firmansyah, D., Suryana, A., Rifai, A. A., Hartika, N., & Syamiya, E. N. (2024). Tps 3r Management Development Model: Social Learning, Collaboration And Partnership, Zero Waste Lifestyle For A Sustainable Future. *Journal Of Community Service And Society Empowerment*, 2(02), 228–239. <https://Doi.Org/10.59653/Jcsse.V2i02.745>
- Kamal, M., Irawan, R., Muchdatul Ayunda, H., Faujiyah, F., Fajri, N., Muhammad Ardian Setiadi, R., Saberan, F., Mandiri, M., Yohanes, A., Ardiansyah Ekoanindiyo, F., Prihastono, E., Tinta Manik, V., Windiastuti, E., Apsari Pebrianti, S., Valentino Pipiana, P., Sunarsih, S., & Pratiwi, Y. (2024). Optimalisasi Pelayanan Tps3r Di Kelurahan Panjuran Menggunakan Metode Contingent Valuation Method. *Eprints.Itenas.Ac.Idmfi Putra, I Juwanajurnal Serambi Engineering (Jse)*, 2023•*Eprints.Itenas.Ac.Id*, 9(1), 2024. <https://Doi.Org/10.32672/Jse.V9i1>
- Laufin Zulfikar, M., Sri Winarno, H., & Muyasaroh, N. (2024). Studi Pengelolaan Sampah Di Tps3r Go-Sari Guwosari Dan Tps3r Ksm Sejahtera Mandiri Bantul. *Journal.Ity.Ac.Idml Zulfikar, H Sriwinarno, N Muyasarohjurnal Rekayasa Lingkungan*, 2024•*Journal.Ity.Ac.Id*. <https://Journal.Ity.Ac.Id/Index.Php/Jrl/Article/View/323>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Mukti, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (Tps 3r) Di Kabupaten Purbalingga. *Ejournal3.Undip.Ac.Idnn Muktijournal Of Politic And Government Studies*, 2024•*Ejournal3.Undip.Ac.Id*. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jpgs/Article/View/48711>
- Priyono, C., & Pramesetyawati, T. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Di Tps 3r Peganden Dan Tps 3r Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik: Indonesia. *Envirotek.Upnjatim.Ac.Idcb Priyono, Tn Pramesetyawatienvirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2024•*Envirotek.Upnjatim.Ac.Id*. <https://Envirotek.Upnjatim.Ac.Id/Index.Php/Envirotek/Article/View/330>
- Purba, H. D., Meidiana, C., & Adrianto, D. W. (2014). Waste Management Scenario Through Community Based Waste Bank: A Case Study Of Kepanjen District, Malang Regency, Indonesia. *International Journal Of Environmental Science And Development*, 212–216. <https://Doi.Org/10.7763/Ijesd.2014.V5.480>
- Rachmadika Baharintasari, D., Utami, T., & Handoko, C. T. (2026). Tps3r Mojo Makmur Waste Processing Facility In Sustainable Waste Management. *Ejournal.Kesling-Poltekkesbjm.Comdr Baharintasari, T Utami, Ct Handokojurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi*, 2026•*Ejournal.Kesling-Poltekkesbjm.Com*, 23(1), 35–46. <https://Doi.Org/10.31964/Jkl.V23i1.1112>
- Ratri, I. S., Meidiana, C., Eka, K., Jurusan, S., Wilayah, P., & Kota, D. (2022). Peran Tpst Dan Tps 3r Dalam Mereduksi Sampah Di Kota Batu. *Planning For Urban Region And Environment Journal (Pure)*, 11(1), 121–132.

<https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/488>

- Utomo, S. B., Wijayanti, A., Cahyaningrum, M., & Handayani, N. P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali Terhadap Pengelolaan Tps3r. *Ojs.Umrah.Ac.Idsb Utomo, A Wijayanti, M Cahyaningrum, Np Handayanikhidmat: Journal Of Community Service, 2024•Ojs.Umrah.Ac.Id, 1.* <https://doi.org/10.31629/khidmat.v1i1.6838>
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan. *Lentera, Xviii(1)*, 53. <https://doi.org/10.21093/lj.v17i1.428>
- Winanda, L. A. R., Mariannti, A., & Wahyani W. (2020). Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Abm-Mengabdi*, 7(1), 28–36.
- Wulandari, D., Utomo, S. H., & Narmaditya, B. S. (2017). Waste Bank: Waste Management Model In Improving Local Economy. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 7(3), 36–41. <https://www.econjournals.com/index.php/ijee/article/view/4496>